

# PARTISIPASI POLITIK DAN PERILAKU MEMILIH PADA PEMILU 2014<sup>1</sup>

## *POLITICAL PARTICIPATION AND VOTING BEHAVIOR IN GENERAL ELECTION 2014*

**RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin**

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta

*E-mail:* em\_yustiningrum@yahoo.com, wichwanuddin@gmail.com

Diterima: 27 Februari 2015; direvisi: 28 Mei 2015; disetujui: 25 Juni 2015

### *Abstract*

*The premise of this research is the idea that there was trend in political participation and voting behavior in general election 2014. In this research, it is believed that there are three factors influence those phenomenon such as sociological factors, psychological factor, and rational choice factor. The research highlights the most influential factors on political participation and voting behavior during general election 2014.*

**Keywords:** *political participation, voting behavior, general election 2014, sociological factor, psychological factor, rational choice factor*

### **Abstrak**

Gagasan utama kajian ini adalah untuk memahami kecenderungan partisipasi politik dan perilaku memilih pada pemilu 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut ada tiga yaitu faktor sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional terhadap perilaku memilih pemilih Indonesia. Kajian ini juga memetakan faktor yang paling mempengaruhi partisipasi politik dan perilaku memilih dalam pemilu 2014 lalu.

**Kata Kunci:** partisipasi politik, perilaku memilih, pemilu 2014, faktor sosiologis, faktor psikologis, faktor pilihan rasional

### **Pendahuluan**

Pada 9 April 2014 yang lalu, pemilihan umum keempat di Era Reformasi untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat digelar. Sekitar 67,25% dari 185.826.024 pemilih menggunakan hak pilihnya dan menghasilkan 124.972.491 suara sah. Dalam pemilu legislatif tahun 2014

lalu, jumlah kursi DPRD propinsi bertambah dari 2.008 kursi pada pemilu 2009 menjadi 2.137 pada pemilu 2014, dimana terdapat penambahan 134 kursi DPRD propinsi secara nasional. Sementara itu, kursi DPRD kabupaten/kota bertambah dari 16.345 kursi pada pemilu 2009 menjadi 17.560 pada pemilu 2014, dimana terdapat penambahan

---

<sup>1</sup> Tim peneliti terdiri dari Wawan Ichwanuddin (koordinator), RR Emilia Yustiningrum, Muhammad Fakhry Ghofur, Atika Nur Kusumaningtyas, Wasisto Raharjo Jati.

sebanyak 1.215 kursi DPRD kabupaten/kota di Indonesia.<sup>2</sup>

Dari hasil tersebut, ada beberapa hal yang diperdebatkan publik dan penting untuk dianalisis dalam konteks studi perilaku memilih. *Pertama*, secara umum distribusi perolehan suara cenderung menyebar dimana tidak ada satu partai pun yang memperoleh suara mayoritas. Bahkan, persentase perolehan suara pemenang pemilu (18,95%, PDIP) lebih rendah jika dibandingkan dengan pemenang pemilu sebelumnya (20,81%, Demokrat). Perolehan suara PDIP yang gagal mencapai angka 27%, sebagaimana ditargetkan oleh pengurus partai ini, memunculkan pertanyaan mengenai seberapa besar kontribusi Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden terhadap perolehan suara PDIP di pemilu legislatif. Sebelumnya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan P2P LIPI tahun 2013 lalu meyakini bahwa akan ada Jokowi *effect* yang akan membantu PDIP untuk mendongkrak perolehan suaranya dalam Pileg 2014. Beberapa diantaranya, memprediksi PDIP akan menang dengan perolehan suara seperti pada Pemilu 1999, atau paling tidak menembus angka 30%. Analisis terhadap pengaruh Jokowi atau figur lain dalam Pemilu 2014 ini dapat diperbandingkan dengan analisis pengaruh Susilo Bambang Yudhoyono terhadap perolehan suara Demokrat dalam Pemilu 2004 dan 2009.

Sebagaimana dilaporkan oleh berbagai hasil survei sepanjang tahun 2013, tingkat keterpilihan atau elektabilitas Jokowi sebagai calon presiden memang terus menanjak. Elektabilitas Jokowi dalam survei P2P LIPI pada bulan Mei 2013, contohnya, mencapai 21% dan menjadi yang tertinggi diantara tokoh-tokoh lain. Jika Jokowi dihadapkan dengan beberapa tokoh lain dalam simulasi 3-4 capres, yang saat itu diprediksi sebagai jumlah yang paling mungkin terjadi dalam pilpres, elektabilitas Jokowi bahkan mencapai 38%. Dalam beberapa bulan berikutnya, elektabilitas Jokowi menunjukkan tren positif. Survei Kompas, contohnya, pada Desember 2013 menyebutkan angkanya sudah

di atas 43%. Bahkan, jauh sebelum Pilpres 2014 diselenggarakan, beberapa survei menyimpulkan bahwa jika Jokowi menjadi calon presiden, akan sulit bagi calon lain untuk mengalahkannya.

*Kedua*, untuk kali keempat penyelenggaraan pemilu di Era Reformasi kembali menghasilkan pemenang pemilu yang berbeda. Fluktuasi perolehan suara partai politik, terutama partai dengan perolehan suara terbanyak, secara sederhana mengindikasikan cairnya pilihan pemilih kita. Secara sederhana kelompok pemilih ini digambarkan sebagai pemilih yang dapat menghukum partai politik yang gagal menunjukkan kinerja yang baik dan memuaskan publik, misalnya karena banyak kadernya yang tersangkut kasus korupsi, dengan tidak memilihnya kembali pada pemilu berikutnya. Namun, apakah benar demikian?. Volatilitas suara yang cukup tinggi juga memunculkan pertanyaan mengenai seberapa jauh *party identification* atau *partisanship* pemilih kita dan apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi.

*Ketiga*, berbeda dengan prediksi beberapa lembaga survei, perolehan suara partai-partai Islam atau partai-partai yang memiliki basis massa Muslim justru mengalami kenaikan. Bahkan, ada partai Islam yang perolehan suaranya diprediksi tidak akan melewati ambang batas parlemen 3,5% persen. Kenyataannya, ada empat dari lima partai Islam atau berbasis massa Muslim yang melenggang ke Senayan, yaitu PKB, PAN, PPP, dan PKS. Hanya PBB yang gagal melampaui ambang batas tersebut. Secara keseluruhan, perolehan suara partai-partai ini justru mengalami kenaikan sekitar 3% menjadi 31,41%. Hasil ini membuat pertanyaan mengenai pengaruh politik aliran atau, secara lebih sempit lagi, pengaruh agama terhadap pilihan pemilih menjadi tetap relevan untuk didiskusikan. Apakah faktor agama dan faktor-faktor lain yang terkait, seperti tingkat religiusitas (kesalehan) atau afiliasi organisasi keagamaan masih berpengaruh terhadap keputusan yang diambil pemilih kita saat memberikan suaranya dalam Pileg 2014. Dalam konteks yang lebih luas, pertanyaan serupa juga penting diajukan terhadap faktor-faktor sosiologis lain, seperti domisili (perdesaan-perkotaan), gender, suku, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Apakah

<sup>2</sup> Arfi Bambani Amri dan Arief Hidayat, "Jumlah Kursi DPRD di Pemilu 2014 Bertambah", 18 Januari 2013, <http://politik.news.viva.co.id/news/read/383568-jumlah-kursi-dprd-di-pemilu-2014-bertambah>, diakses pada tanggal 28 September 2015.

faktor-faktor sosiologis tersebut berpengaruh bagi pemilih kita?

Dikombinasikan dengan berbagai hal lain beberapa pertanyaan di atas membawa kita pada pertanyaan besar mengenai perilaku memilih pemilih kita, terutama apa yang berubah dan apa yang tetap bertahan. Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab pertanyaan berikut: (1) Bagaimana perilaku memilih pemilih pada Pemilu 2014? (2) Faktor apa saja yang memengaruhi pilihan pemilih terhadap partai politik pada Pemilu 2014?

## Kerangka Analisis

Secara garis besar, ada tiga model atau mazhab (*school of thought*) yang digunakan dalam studi perilaku memilih, yaitu model sosiologis, model psikologis, dan model pilihan rasional atau model ekonomi-politik. Model terakhir juga dikenal dengan nama model pilihan rasional. Berikut ini akan diuraikan masing-masing asumsi dan faktor-faktor yang ditawarkan ketiga model tersebut.

### 1. Model Sosiologis

Penjelasan perilaku memilih dengan menggunakan analisis sosiologis pertama kali dikembangkan oleh sarjana Universitas Columbia sehingga pendekatan ini dikenal juga dengan sebutan Mazhab Columbia. Asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bahwa setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran sosial, seperti keluarga, tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya. Setiap individu didorong untuk menyesuaikan diri sehingga perilakunya dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Konteks ini berlaku dalam soal pemberian suara dalam pemilu.

Menurut pendekatan ini, memilih sebenarnya bukan sepenuhnya merupakan pengalaman pribadi, melainkan suatu pengalaman kelompok. Perilaku memilih seseorang cenderung mengikuti arah predisposisi politik lingkungan sosial dimana ia berada. Dari berbagai ikatan sosial yang ada di tengah masyarakat, banyak sarjana ilmu politik biasanya menunjuk tiga faktor utama sebagai indeks paling awal dari pendekatan ini,

yaitu: status sosial-ekonomi, agama, dan daerah tempat tinggal.<sup>3</sup>

Namun, ada juga yang menyertakan beberapa faktor lain yang dianggap penting untuk diuji. Saiful Mujani, R. William Liddle, dan Kuskritho Ambardi, contohnya, menyebutkan faktor kelas sosial, yang meliputi pendidikan, pekerjaan, tingkat pendapatan; agama dan tingkat religiusitas; ras, etnik, atau sentimen kedaerahan; domisili, yaitu antara perdesaan dan perkotaan; jenis kelamin; dan usia sebagai faktor-faktor sosiologis yang dianggap mempengaruhi pilihan pemilih dalam pemilu.<sup>4</sup> Namun, berdasarkan perbandingan hasil beberapa survei yang mencakup pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden sejak tahun 1999 sampai dengan 2004, mereka menyimpulkan bahwa faktor-faktor sosiologis tidak begitu signifikan lagi terhadap perilaku memilih di Indonesia.<sup>5</sup> Sebelumnya, William Liddle dan Saiful Mujani, dengan membandingkan empat survei opini publik yang dilakukan pada Pemilu 1999 dan 2004 serta Pilpres 2004 putaran pertama dan kedua juga menyimpulkan hal yang sama.<sup>6</sup>

Dwight King dan Anies Baswedan mempunyai kesimpulan berbeda dengan Liddle dan Mujani. Dengan membandingkan hasil dua pemilu yang berbeda, baik Dwight King maupun Anies Baswedan menyimpulkan bahwa faktor orientasi keagamaan atau lebih spesifik lagi politik aliran masih relevan dalam menentukan pilihan pemilih di Indonesia.<sup>7</sup> Dwight King yang

<sup>3</sup> Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*, (Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, 2009), hlm. 24-25.

<sup>4</sup> Saiful Mujani, William R. Liddle, dan Kuskritho Ambardi, *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Mizan Publika, 2012), hlm. 6-21.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 454-461.

<sup>6</sup> R. William Liddle dan Saiful Mujani, "Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia", *Comparative Political Studies*, Vol. 40, No. 7, Juli 2007, hlm. 850-851.

<sup>7</sup> Konsep politik aliran pertama kali dikenalkan oleh Clifford Geertz pada tahun 1960. Ia mengklasifikasikan orientasi keagamaan masyarakat Jawa menjadi empat kelompok, yaitu abangan, santri tradisional, santri modernis, dan abangan. Kelompok abangan yang cenderung animistik umumnya adalah warga desa biasa. Adapun kelompok santri dalam kehidupan sehari-harinya relatif taat menjalankan berbagai ritual dalam

membandingkan hasil Pemilu 1955 dan Pemilu 1999 menyimpulkan bahwa ada pembelahan yang kurang-lebih sama pada kedua pemilu tersebut antara partai-partai dengan aliran politik santri dan abangan dan pembelahan antara santri modernis dan tradisional. Sementara itu, berdasarkan perbandingan basis pemilih menurut kabupaten/kota pada Pemilu 1999 dan 2004, Anies Baswedan menyimpulkan adanya korelasi yang signifikan antara basis pemilih baik partai-partai Islam, nasionalis, maupun Kristen.<sup>8</sup>

Kajian mengenai perilaku memilih di Indonesia yang menggunakan pendekatan sosiologis dikenalkan pertama kali oleh Afan Gaffar. Dalam buku *Javanese Voters*, ia menunjukkan adanya kecenderungan perilaku memilih atau preferensi politik sosio religius maupun sosio personal. Sosio religius sendiri melihat bahwa partisipasi politik dan perilaku memilih lebih didasarkan pada konteks politik aliran sedangkan yang sosio personal menitikberatkan pada konteks bapakisme berdasarkan pada hubungan paternalistik.

## 2. Model Psikologis

Ada tiga pusat perhatian dari pendekatan psikologis, yang pertama kali dikenalkan oleh sarjana Ilmu Politik dari Universitas Michigan, yaitu: (1) persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat; (2) persepsi dan penilaian pribadi terhadap tema-tema yang diangkat; dan (3) identifikasi partai atau *partisanship*. Menurut pendekatan ini, yang berpengaruh langsung terhadap pilihan pemilih bukan struktur sosial, sebagaimana dianalisis oleh pendekatan sosiologis (Mazhab Columbia), melainkan faktor-faktor jangka pendek dan jangka panjang terhadap pemilih.<sup>9</sup>

---

ajaran agama Islam. Mereka umumnya bekerja sedang pedagang dan petani skala kecil. Kelompok ini kemudian dibagi lagi ke dalam dua varian, tradisional dan modernis. Terakhir, kelompok priyayi yang memperoleh pengaruh Hindu umumnya adalah pegawai pemerintahan. Klasifikasi Geertz yang sebenarnya menjelaskan masyarakat Jawa kemudian digunakan secara lebih luas untuk menjelaskan masyarakat Indonesia secara nasional. Empat besar partai politik pada Pemilu 1955, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI dianggap merepresentasikan empat kelompok tersebut. R. William Liddle dan Saiful Mujani, *op.cit.*, hlm. 836.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Dieter Roth, *op.cit.*, hlm. 37.

Orientasi terhadap isu atau tema merupakan konseptualisasi pengaruh jangka pendek yang diperkenalkan oleh pendekatan psikologis. Isu-isu khusus hanya dapat mempengaruhi perilaku pemilih apabila memenuhi tiga persyaratan berikut ini: (1) isu tersebut dapat ditangkap oleh pemilih; (2) isu tersebut dianggap penting oleh pemilih; (3) pemilih dapat menggolongkan posisinya terhadap isu tersebut, baik positif maupun negatif.<sup>10</sup>

Sejak tahun 1970-an, isu dalam studi pemilu dibedakan menjadi dua, yaitu *position issues* dan *valence issues*. *Position issues* merupakan isu dimana masing-masing kelompok atau partai mewakili posisi dan memiliki tujuan yang bukan hanya berbeda, tetapi juga bertentangan. Salah satu contoh isu seperti ini adalah soal aborsi, yaitu antara kelompok *pro-life* dan *pro-choice*. Sementara itu, *valence issues* tidak menyangkut perbedaan tujuan, melainkan hanya cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai contoh, semua partai pasti sepakat untuk meningkatkan kesejahteraan semua warga, termasuk buruh, tetapi masing-masing partai akan memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana peningkatan kesejahteraan tersebut dicapai. Dalam konteks pemilu, *position issues* lebih mempengaruhi keputusan para pemilih. Meskipun demikian, biasanya *position issues* lebih jarang muncul, karena dihindari oleh partai politik, terutama karena isu semacam ini memiliki resiko menimbulkan polarisasi, bahkan di kalangan pengikutnya sendiri.<sup>11</sup>

*Partisanship* atau *party identification* (*Party ID*) dapat digambarkan sebagai 'keanggotaan' psikologis, dimana identifikasi terhadap sebuah partai tidak selalu bersamaan dengan keanggotaan resmi pemilih dengan partai tersebut. *Party ID* lebih sebagai orientasi afektif terhadap partai. PI merupakan orientasi individu terhadap partai tertentu yang bersifat permanen, yang bertahan dari pemilu ke pemilu. *Party ID* masih dapat mengalami perubahan, jika terjadi perubahan pribadi yang besar atau situasi politik yang luar biasa.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

Liddle dan koleganya, Mujani dan Ambardi, termasuk yang berpendapat bahwa faktor-faktor psikologis, terutama kepemimpinan dan identifikasi partai, memiliki pengaruh yang signifikan dibanding faktor-faktor sosiologis, baik agama, suku bangsa, maupun kelas.<sup>13</sup>

### 3. Model Pilihan Rasional

Menurunnya pengaruh kelas dan agama dalam politik telah mendorong para pengkaji perilaku memilih menemukan penjelasan selain pemisahan sosiologis, yang kemudian mendorong semakin mengemukanya faktor ekonomi, kepribadian, isu, dan media. Ada pergeseran dalam studi perilaku memilih ke model yang lebih menekankan individu warga negara sebagai aktor yang relatif mandiri dari partai dan struktur kolektif serta ikatan kesetiaan lainnya.<sup>14</sup>

Teori pilihan rasional (*rational-choice*) yang diperkenalkan pertama kali oleh Anthony Downs sebenarnya tidak hanya terbatas pada studi pemilu. Ia menulis bagaimana demokrasi “diukur” dengan menggunakan pendekatan dalam ilmu ekonomi.<sup>15</sup> Salah satu elemen kunci dalam teori ekonomi Downs dan para penerusnya tentang demokrasi adalah bahwa arena pemilihan umum itu seperti sebuah pasar, yang membutuhkan penawaran (partai) dan permintaan (pemilih). Dalam perspektif penawaran dan permintaan ala teori ekonomi, pemilih rasional hanya akan ada jika partai yang akan mereka pilih juga bertindak rasional. Seperti juga pemilih, partai mempunyai kebutuhan untuk memaksimalkan utilitas mereka, antara lain dari pendapatan pemerintah, kekuasaan, dan gengsi.

Partai dan para politisi pada dasarnya adalah pencari kekuasaan, yang tujuannya mendapatkan dukungan suara setidaknya untuk ikut terlibat dalam pemerintahan. Partai yang sedang berkuasa akan memaksimalkan dukungan pemilih agar terpilih kembali, sedangkan partai oposisi bertujuan memaksimalkan dukungan untuk mengganti pemerintah yang ada. Bagi

partai dan para politisi, fungsi sosial, seperti mengelola pemerintahan dengan efektif atau meningkatkan standar hidup warga, adalah akibat atau hasil dari tindakan rasional mereka (*by product*) dan bukan menjadi tujuan mereka.<sup>16</sup>

Teori ini dibangun dari kombinasi teori-teori aksi sosial dan teori ekonomi tentang rasionalitas. Downs mendefinisikan rasionalitas sebagai usaha untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling *reasonable*. Definisi ini “diturunkan” dari teori ekonomi dimana cara yang paling *reasonable* adalah cara dimana seseorang, berdasarkan pengetahuan terbaik yang dimilikinya, mewujudkan tujuannya dengan menggunakan input sumber daya yang paling sedikit. Dengan kata lain, seorang individu yang rasional tertarik terhadap cara yang biayanya paling efektif dalam memaksimalkan apa yang ia peroleh.<sup>17</sup> Downs menyebutnya sebagai *utility maximation*.<sup>18</sup>

Dalam konteks pemilu, teori ini pada dasarnya menekankan pada motivasi individu untuk memilih atau tidak dan bagaimana memilih berdasarkan kalkulasi mengenai keuntungan yang diakibatkan dari keputusan yang dipilih. Teori yang menempatkan individu, dan bukan lingkungan yang ada di sekitar individu, sebagai pusat analisis ini menggunakan pendekatan deduktif.

Downs menyusun lima kriteria rasionalitas yang harus dipenuhi agar sebuah keputusan dapat dikatakan sebagai pilihan rasional<sup>19</sup> yaitu (a) Individu dapat membuat sebuah keputusan ketika dihadapkan pada serangkaian alternatif pilihan; (b) Individu dapat menyusun preferensi dirinya dengan pilihan-pilihan yang ada secara berurutan; (c) Susunan preferensi tersebut bersifat transitif, contoh individu lebih memilih alternatif 1 daripada alternatif 2, lebih memilih alternatif 2 daripada alternatif 3, dan seterusnya, dengan konsekuensi bahwa pilihan 1 lebih diutamakan dari pilihan-pilihan berikutnya; (d) Individu akan selalu memilih alternatif yang ia

<sup>13</sup> William Liddle dan Saiful Mujani, *op.cit.*, hlm. 839-850.

<sup>14</sup> Ola Listhaug, “Retrospective Voting”, dalam Jacques Thomassen (Eds.), *The European Voter: A Comparative Study of Modern Democracies*, (New York: Oxford University Press, 2005), hlm. 214.

<sup>15</sup> Dieter Roth, *op.cit.*, hlm. 38.

<sup>16</sup> Jocelyn A.J. Evans, *Voters and Voting*, (London: Sage Publications, 2004), hlm. 72-73.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 70-71.

<sup>18</sup> Dieter Roth, *op.cit.*, hlm. 49.

<sup>19</sup> Jocelyn A.J. Evans, *op.cit.*, hlm. 71.

merasakan paling dekat (utama); dan (e) Jika dihadapkan pada berbagai pilihan di waktu yang berbeda dalam lingkungan yang sama, individu akan membuat keputusan yang sama.

Kriteria teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa individu mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang ia inginkan sebagai sebuah *outcome*, bagaimana pilihan-pilihan tersebut terkait dengan *outcome*, dan mempunyai seperangkat kriteria yang tetap untuk mengukur alternatif yang berbeda guna menjamin dipilihnya sebuah alternatif setiap waktu. Artinya, individu diasumsikan mempunyai informasi yang memungkinkannya membuat pilihan tersebut.<sup>20</sup>

Kebutuhan terhadap informasi yang lengkap inilah merupakan salah satu permasalahan dari teori ini. Jika informasi yang tersedia cukup lengkap, maka alternatif-alternatif pilihan lebih mudah dirumuskan dan ditimbang untuk dipilih. Dalam pemilu, informasi tersebut akan mengantarkan pemilih pada perbandingan keuntungan yang bisa diberikan oleh masing-masing partai atau kandidat jika mereka berkuasa. Namun, kenyataannya informasi yang lengkap jarang dimiliki oleh pemilih. Karena itu, pemilih umumnya harus mengambil keputusan di tengah “ketidaktahuan”.<sup>21</sup> Jadi, saat melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah sebelumnya, misalnya, pemilih bisa saja tidak mempunyai pengetahuan mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah dan alternatif lain bagi tindakan tersebut.

Ada beberapa cara yang mungkin dilakukan pemilih untuk membatasi ketidaktahuan ini. *Pertama*, ia hanya mengumpulkan informasi mengenai bidang-bidang yang menurutnya paling penting sehingga pengeluaran yang harus ia tanggung dapat dibatasi dan tidak melampaui kegunaan dari informasi tersebut. *Kedua*, ia menggunakan kerja dari pihak lain, seperti partai, media, kelompok kepentingan, dan sebagainya yang mengumpulkan, memilih, menganalisis, dan menyampaikan informasi. Dalam konteks ini, pemilih melimpahkan sebagian beban

pengeluaran untuk memperoleh informasi kepada pihak lain.<sup>22</sup>

Berdasarkan informasi yang dimiliki pemilih, Downs membagi mereka menjadi beberapa kelompok, yaitu: (1) pemilih agitator, yang mempunyai informasi dan menggunakannya untuk mempengaruhi pemilih lain untuk memilih dengan cara yang sama dengan dirinya; (2) pemilih pasif, yang menggunakan informasinya untuk dirinya sendiri; (3) pemilih yang belum jelas pilihannya, karena tidak mempunyai informasi yang memadai; (4) pemilih loyalis, yang menggunakan informasi pada pemilu sebelumnya untuk memilih. Pemilih loyalis tetap dengan pilihan lamanya selama utilitas yang ia peroleh tidak berubah menjadi lebih buruk.<sup>23</sup>

Tentang pemberian suara (*voting*), Downs memberikan batasan bahwa *rational voting* hanya menunjuk pada pilihan yang didasarkan pada motivasi ekonomi dan politik. Beberapa isu ekonomi yang paling penting, antara lain pertumbuhan, pengangguran, dan inflasi. Keputusan yang didorong oleh ketakutan, misalnya yang disebabkan oleh tekanan keluarga, dorongan untuk ikut-ikutan orang di sekitarnya, atau klientelisme tidak dapat dikategorikan sebagai *rational voting*. Hal paling penting yang harus dicatat dari teori *rational voting* adalah bahwa pemberian suara dalam pemilu (*voting*) memberikan kontribusi bagi *outcome* kolektif, daripada mempengaruhi pemilih semata-mata sebagai individu.<sup>24</sup>

Kajian ini akan menggunakan ketiga pendekatan untuk mengukur faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi dan pilihan pemilih terhadap partai politik dan bakal calon presiden. Menurut Warrant E. Miller dan J. Merrill Shanks, seperti dikutip Saiful Mujani dan kawan-kawan, ketiga model tersebut harus dipahami dalam suatu hierarki faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih. Faktor-faktor dalam model sosiologis dapat ditempatkan sebagai komponen yang paling dasar. Di atasnya, faktor-faktor dari model psikologis dan pilihan rasional menjadi penjelasan lanjutan. Dimulai

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>21</sup> Dieter Roth, *op.cit.*, hlm. 50.

---

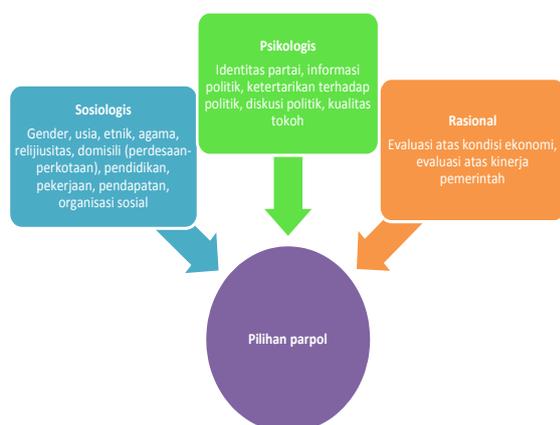
<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Jocelyn A.J. Evans, *op.cit.*, hlm. 76.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

dari identitas partai (*partisanship*), predisposisi atas kebijakan-kebijakan pemerintah beserta persepsi tentang kondisi saat ini, evaluasi atas kinerja partai atau pejabat yang berkuasa, persepsi tentang citra personalitas calon, hingga prospek calon atau partai jika terpilih (berkuasa). Jadi, pilihan untuk berpartisipasi atau memilih partai atau kandidat tertentu merupakan kompleksitas dari berbagai faktor dalam ketiga model tersebut.<sup>25</sup>

Karena itu, analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini tidak lain merupakan upaya untuk menguji ketiga model perilaku memilih, yaitu model sosiologis, model pilihan rasional, dan model psikologis. Bagan 1 menunjukkan variabel-variabel yang akan diukur dalam survei ini.



**Gambar 1.** Bagan Kerangka Analisis Perilaku Memilih

## Metodologi

Kajian ini merupakan kajian kuantitatif. Pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan metode survei karena metode ini dianggap paling tepat digunakan untuk menggambarkan karakteristik sebuah populasi yang besar.<sup>26</sup> Selain itu, metode survei juga dianggap sangat tepat digunakan untuk kajian yang pertanyaannya mengenai *self-reported beliefs or behaviors*. Ada beberapa kategori yang dapat dijawab melalui kajian survei, antara lain kategori yang

<sup>25</sup> Saiful Mujani, William Liddle, dan Kuskridho Ambardi, *op.cit.*, hlm. 34.

<sup>26</sup> Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, (USA: Wadsworth/Thomson Learning, 2000), hlm. 268.

menyangkut perilaku, kepercayaan, opini, karakteristik, harapan, klasifikasi mandiri, dan pengetahuan. Kajian survei kuantitatif pada dasarnya mengikuti sebuah pendekatan deduktif, yaitu memulai dengan sebuah masalah yang bersifat teoritis dan mengakhirinya dengan pengukuran empiris dan analisis data.<sup>27</sup>

Kajian ini dilakukan secara nasional (*nation-wide*), menjangkau 790 responden yang tersebar di 79 desa/kelurahan di 30 provinsi di Indonesia. Responden sepenuhnya dipilih secara acak bertingkat (*multi-stage random sampling*), dengan memperhatikan proporsi pemilih di masing-masing provinsi, proporsi perdesaan dan perkotaan (46:54), dan proporsi laki-laki dan perempuan (50:50). Ambang kesalahan (*margin of error*) dari survei ini adalah  $\pm 3,49\%$ , dengan tingkat kepercayaan 95%.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka (*face to face interview*) terhadap masyarakat usia dewasa (17 tahun ke atas atau sudah menikah) pada saat survei dilaksanakan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner (wawancara terstruktur). Untuk menjamin kualitas wawancara, dilakukan kontrol secara sistematis dengan melakukan cek ulang di lapangan (*spot check*) terhadap 27,2% responden.

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui wawancara tatap muka. Sementara itu, pengolahan data akan dilakukan melalui rangkaian proses *data coding*, *data entering*, dan *data cleaning*. Data yang dihasilkan dari proses tersebut kemudian dianalisis.

## Temuan Survei

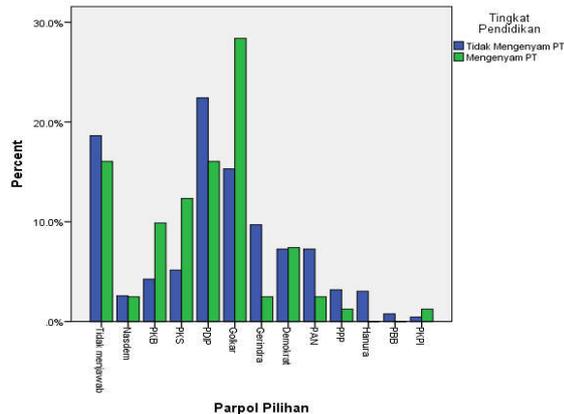
### 1. Partisipasi Politik dalam Pemilu

Survei yang dilakukan oleh P2P LIPI pasca-Pemilu Legislatif 2014, lalu mengambil berbagai bentuk partisipasi politik, dari bentuk prosedural dalam proses demokrasi sampai pada pemahaman responden tentang partisipasi politik yang lebih substansial dalam proses tersebut. Pertimbangan untuk mengikutsertakan berbagai bentuk partisipasi tersebut adalah untuk mendapatkan

<sup>27</sup> W. Lawrence Neuman, *Sosial Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Third edition*, (Boston: Allyn and Bacon, 2000), hlm. 228.

gambaran umum dari partisipasi masyarakat serta tingkatan partisipasi tersebut.

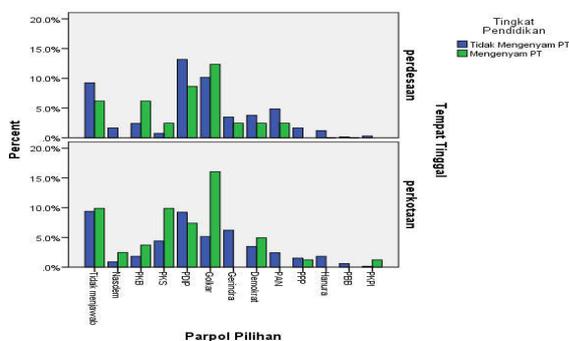
Aspek pertama yang dibahas adalah tingkat pendidikan dan pilihan partai. Dalam pembahasan tentang partisipasi politik, tingkat pendidikan mempengaruhi partai politik yang dipilih dalam pemilu legislatif, yang dapat dilihat dalam Gambar 1 dibawah ini.



**Gambar 2.** Tingkat Pendidikan dan Pilihan Partai

Gambar 2 memperlihatkan bahwa pemilih yang memiliki pendidikan setingkat perguruan tinggi mayoritas memilih partai Golongan Karya, PDI Perjuangan, dan PKS. Sementara itu pemilih yang tidak memiliki pendidikan setingkat perguruan tinggi mayoritas memilih PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra.

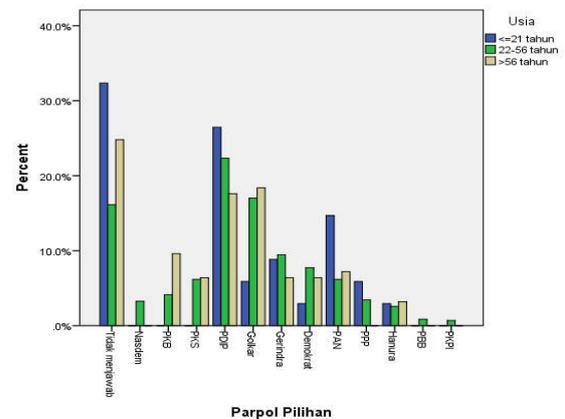
Sementara itu, lokasi tempat tinggal baik itu di perkotaan dan perdesaan memiliki pengaruh dalam pemilihan partai politik dalam pemilu legislatif 2014 lalu. Kaitan antara tingkat pendidikan, lokasi tempat tinggal, dan pilihan partai politik dapat dilihat dalam Gambar 3 dibawah ini.



**Gambar 3.** Kaitan antara Tingkat Pendidikan, Lokasi Tempat Tinggal, dan Pilihan Partai Politik

Dalam Gambar 3 memperlihatkan bahwa pemilih yang memiliki pendidikan tinggi, tinggal di perkotaan, mayoritas masih memilih partai Golkar, PKS, dan PDI Perjuangan. Sementara pemilih yang juga tinggal di perkotaan dan tidak memiliki pendidikan setingkat perguruan tinggi mayoritas memilih PDI Perjuangan, Gerindra, dan Golkar. Sementara itu, untuk pemilih yang memiliki pendidikan setingkat perguruan tinggi namun tinggal di perdesaan mayoritas memilih partai Golkar, PDI Perjuangan, dan PKB. Untuk pemilih yang tidak memiliki pendidikan tinggi dan tinggal di perdesaan, mayoritas memberikan suara pada partai yang sama yaitu Golkar, PDI Perjuangan, dan PKB. Yang menarik adalah pemilih di perdesaan dimana baik pemilih yang memiliki pendidikan setingkat perguruan tinggi maupun tidak, ternyata memilih pilihan partai politik yang sama.

Para pemilih dalam pemilu legislatif ini ternyata memiliki rentang usia yag berbeda. Adapun kaitan antara rentang usia dengan pilihan partai politik dapat dilihat dalam Gambar 4 di bawah ini.

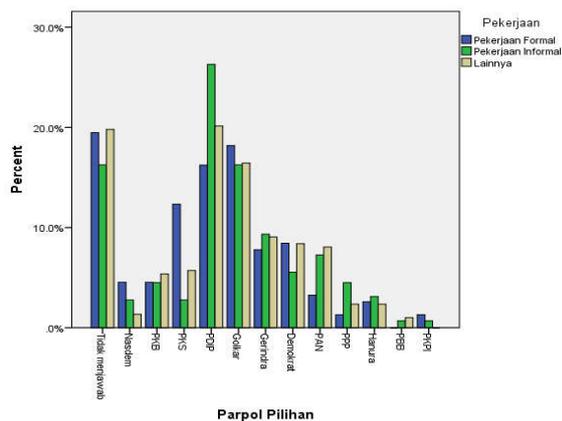


**Gambar 4.** Kaitan antara Usia dengan Pilihan Partai Politik

Gambar 4 memperlihatkan bahwa pemilih yang berusia <21 tahun mayoritas memberikan suara pada PDI Perjuangan, PAN, dan Gerindra. Sementara itu, pemilih yang berusia 22-56 tahun mayoritas memberikan suara pada PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra. Kelompok usia >56 tahun mayoritas memberikan suara pada Golkar, PDI Perjuangan, dan PKB. Bisa dikatakan bahwa mayoritas pemilih PDI

Perjuangan adalah kalangan muda yang berusia dibawah 21 tahun, kelompok usia produktif yang berusia 22-56 tahun, dan kelompok lanjut usia diatas 56 tahun.

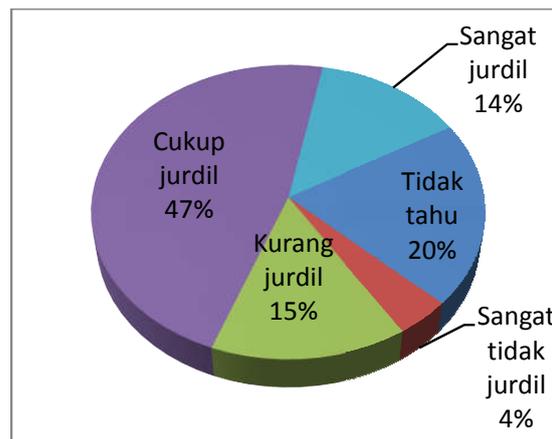
Mata pencaharian para pemilih, baik pekerjaan formal maupun informal, juga mempengaruhi pilihan terhadap partai politik. Adapun kaitan antara mata pencaharian dengan pilihan terhadap partai politik dapat dilihat dalam Gambar 5 dibawah ini.



**Gambar 5.** Kaitan antara Pekerjaan dan Pilihan Partai Politik

Gambar 5 memperlihatkan bahwa pemilih yang memiliki latar belakang pekerjaan informal mayoritas memberikan suaranya pada PDI Perjuangan, disusul oleh partai Golkar, dan Gerindra. Sementara itu, pemilih yang memiliki latar belakang pekerjaan formal mayoritas memberikan suaranya pada partai PDI Perjuangan, partai Golkar, dan Gerindra. Yang menarik adalah baik pemilih yang memiliki latar belakang pendidikan formal dan informal sama-sama memberikan mayoritas suaranya pada PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra. Secara sederhana hal-hal tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi partisipasi dalam pemilu legislatif lalu.

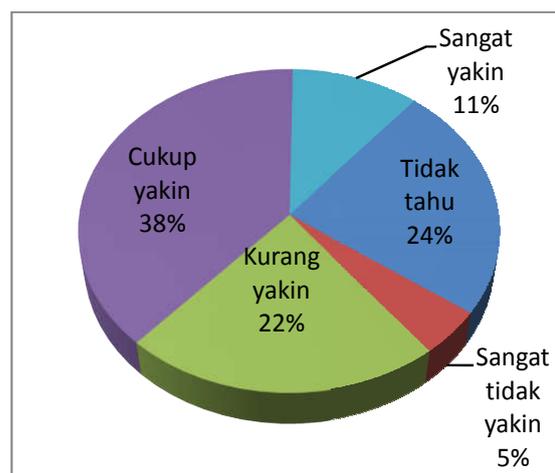
Dalam memahami pelaksanaan pemilu legislatif 2014 lalu, para pemilih menyatakan bahwa pemilihan umum berlangsung jujur dan adil. Namun demikian pendapat para pemilih ini beragam antara yang menyatakan jujur dan adil, serta tidak jujur dan tidak adil, yang dapat dilihat dalam Gambar 6 di bawah ini.



**Gambar 6.** Pelaksanaan Pemilu Secara Jujur dan Adil

Gambar 5 memperlihatkan bahwa mayoritas responden (47%) menyatakan bahwa pemilu legislatif berlangsung secara cukup jujur dan adil, yang disusul oleh 15% responden yang menyatakan kurang jujur dan adil, 14% responden yang menyatakan sangat jujur dan adil, dan hanya 4% responden yang menyatakan pemilu legislatif berjalan sangat tidak jujur dan adil.

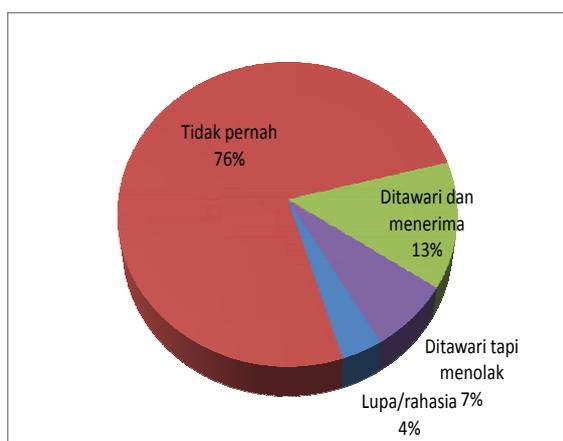
Dalam pemilu legislatif tahun 2014 akan menghasilkan anggota DPR dalam kurun waktu 2014-2019. Para pemilih yang diwakili melalui suara para responden ini menyampaikan harapan yang tinggi tentang kinerja anggota DPR pada periode yang akan datang, yang dapat dilihat dalam Gambar 7 dibawah ini.



**Gambar 7.** Kinerja DPR Lebih Baik Pasca-Pemilu Legislatif 2014

Gambar 7 ini memperlihatkan pengharapan para pemilih, yang diwakili oleh para responden survei, terhadap kinerja DPR dalam periode lima tahun yang akan datang. Sebanyak 38% responden cukup yakin dengan kinerja DPR akan menjadi lebih baik, yang disusul oleh 22% yang kurang yakin, 11% yang sangat yakin, dan 5% yang sangat tidak yakin.

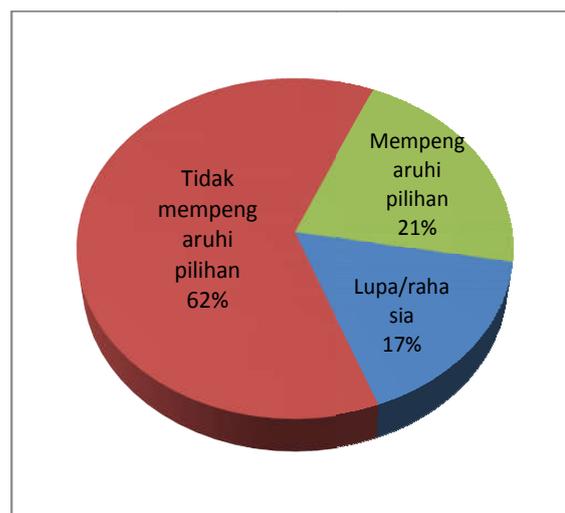
Sementara itu, partisipasi para pemilih yang diwakili oleh responden menunjukkan fenomena yang menarik, khususnya untuk menggali alasan memilih salah satu partai politik dengan tawaran materi. Hal ini dapat dilihat dalam Gambar 8 berikut ini.



**Gambar 8.** Tawaran Imbalan Materi dalam Pemilu Legislatif

Dalam Gambar 8 memperlihatkan bahwa sebanyak 76% mengaku tidak pernah ditawari imbalan materi dalam pemilu legislatif lalu, yang disusul oleh 13% responden yang mengaku ditawari dan menerima imbalan materi tersebut, 7% responden yang mengaku ditawari dan menolak imbalan materi, serta 4% responden yang mengaku lupa atau tidak mau membuka rahasia, bahwa pernah ditawari imbalan materi dalam pemilu legislatif lalu.

Kalaupun ada yang pernah ditawari imbalan materi dalam pemilu legislatif 2014 lalu, menarik untuk menyimak bagaimana imbalan materi tersebut mempengaruhi atau tidak mempengaruhi pilihan responden terhadap partai politik. Hal ini dapat dilihat dalam Gambar 9 dibawah ini.



**Gambar 9.** Kaitan Imbalan Materi dengan Pengaruh dalam Pemilu Legislatif

Gambar 9 memperlihatkan bahwa sebanyak 62% responden menyatakan imbalan materi yang diterima tidak mempengaruhi pilihan partai politik dalam pemilu legislatif lalu. Namun demikian, kondisi berbeda terjadi pada 21% responden yang menyatakan bahwa imbalan materi mempengaruhi pilihan dalam pemilu legislatif, dan terdapat 17% responden yang mengaku lupa, maupun tidak mau membuka rahasia, bahwa imbalan materi yang diterima mempengaruhi pilihan politiknya.

## 2. Faktor Sosiologis dalam Perilaku Memilih

Kajian ini membahas mengenai hal-hal atau pertimbangan apa saja yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan caleg atau partai politik yang dipilihnya, yang ditinjau dari faktor sosiologis seperti agama, pendidikan, tempat tinggal, usia, pekerjaan, jenis kelamin, dan besar pengeluaran finansial. Temuan survei menunjukkan bahwa faktor agama yang berupa latar belakang agama caleg, dan faktor pendidikan yang berupa latar belakang pendidikan caleg serta latar belakang pendidikan pemilih, mempengaruhi pilihan dalam pemilu legislatif lalu.

Dalam Gambar 10 memperlihatkan bahwa sebanyak 88,61% responden survei mengaku beragama Islam. Para responden yang beragama Islam tersebut, sebanyak 78,31% mengaku menjalankan ibadah dengan cukup atau sangat

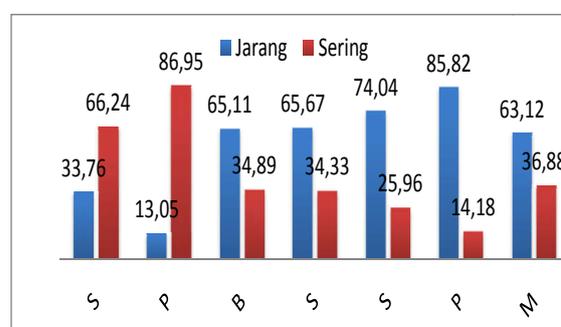
taat dan hanya 15,95% yang mengaku kurang atau tidak taat dalam menjalankan ibadah. Dalam Islam terdapat ibadah wajib dan juga ibadah sunah, ketaatan responden dalam beribadah terlihat pada seringnya responden mengerjakan ibadah wajib, yaitu shalat lima waktu dan puasa Ramadhan. Puasa Ramadhan merupakan ibadah yang paling jarang ditinggalkan oleh sebagian besar responden sebanyak 86,95%, sedangkan ibadah shalat lima waktu sering dilakukan oleh sebanyak 66,24% responden. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa kaum Muslim di Indonesia taat beribadah sehingga dapat juga dikatakan kaum Muslim di Indonesia secara homogen sangat religius.<sup>28</sup>

Pada saat agama mempengaruhi kehidupan seseorang, disaat yang sama corak pemikiran dan pemahaman keagamaan seseorang akan pula berimplikasi terhadap kehidupannya. Dengan demikian, adanya pluralitas agama dan corak pemikiran keagamaan dalam suatu agama dengan sendirinya dapat pula membentuk perilaku politik seseorang.<sup>29</sup>

Hal ini sejalan dengan hasil survei yang memperlihatkan bahwa faktor agama menjadi salah satu faktor yang menjadi dasar pertimbangan responden dalam memilih caleg. Bagi responden yang taat maupun yang tidak taat dalam menjalankan ibadah, cenderung memilih caleg yang menganut agama yang sama. Responden yang mengaku cukup atau sangat taat beribadah sebanyak 41,6%, menyatakan bahwa kesamaan agama yang dianut oleh caleg dengan dirinya menjadi salah satu pertimbangannya dalam memilih caleg. Sementara itu, dari responden yang mengaku kurang atau tidak taat beribadah sebanyak 31%, juga mempertimbangkan kesamaan agama yang

dianut caleg dengan dirinya dalam menentukan caleg yang dipilihnya. Secara keseluruhan, tanpa melihat ketaatan responden dalam beribadah dalam memilih caleg, terdapat 39% responden mempertimbangkan kesamaan agama yang dianut dirinya dengan caleg.

Namun demikian, terdapat sebanyak 14,8% responden yang tidak menganggap agama yang dianut caleg sebagai suatu hal yang perlu dipertimbangkan, dan sebanyak 46,2% responden tidak memberikan jawaban saat ditanya mengenai hal ini. Dari responden yang tidak menganggap agama caleg sebagai hal yang perlu dipertimbangkan dan responden yang tidak memberikan jawaban terkait hal tersebut, merupakan responden yang tinggal di perkotaan.



**Gambar 10.** Tingkat Relijiusitas Pemilih Muslim

Secara teori, tingkat pendidikan seseorang dapat memberikan pengaruh terhadap seseorang dalam menentukan pilihan politiknya. Perilaku memilih dari responden yang memiliki pendidikan tinggi cenderung berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional.<sup>30</sup>

Pada survei perilaku pemilih yang dilakukan tahun 2014 ini, dari keseluruhan responden hanya sekitar 10,76% saja yang menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi, sedangkan sebanyak 89,24% lainnya hanya menyelesaikan pendidikan

<sup>28</sup> Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007). Dari hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani pada tahun 2001 dan 2002, sebanyak 88% responden Muslim menyatakan bahwa mereka selalu atau cukup sering menunaikan ibadah shalat lima waktu dan sebanyak 94% responden selalu atau cukup sering melaksanakan puasa Ramadhan. Berdasarkan persentase ini, kaum Muslim di Indonesia dapat dikatakan secara homogen sangat religius.

<sup>29</sup> Adat Sudrajat, "Agama dan Perilaku Politik", *Jurnal Humanika*, No. 1, Tahun 1, 2002, h. 6.

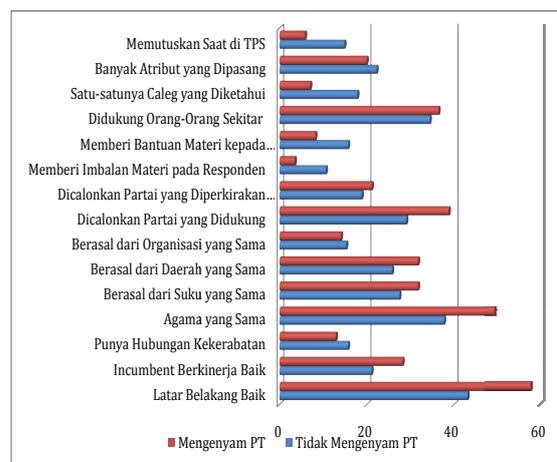
<sup>30</sup> Pada penelitiannya, responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTP umumnya memilih kepala desa atas pertimbangan lebih mengenal figur kepala desa dan tidak mempertimbangkan kelayakan dari pengalaman dan lain sebagainya, sedangkan responden yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi (akademi dan perguruan tinggi) memilih kepala desa dengan pertimbangan yang lebih rasional seperti mempunyai pengetahuan dan pengalaman. Mulyawarman, "Perilaku Pemilih Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa: Kasus Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar", <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/download/1265/1256>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2014.

sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau di bawahnya. Pada dasarnya, dalam menentukan caleg yang dipilihnya, hal-hal yang paling menjadi pertimbangan responden baik yang tidak menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi maupun responden yang menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi relatif sama, yaitu latar belakang yang baik misalnya dalam hal pendidikan atau pengalaman, kesamaan agama yang dianut, caleg tersebut merupakan pilihan orang-orang di sekitar responden seperti keluarga, teman kerja atau tetangga, serta partai yang mencalonkan caleg tersebut sekaligus merupakan partai yang dipilih oleh responden.

Stephen Franzoi berpendapat bahwa apabila caleg mempunyai kredibilitas, terpercaya, dan berkompentensi maka pesan yang disampaikan pemilih dapat lebih diperhatikan, akan tetapi apabila caleg tidak mempunyai unsur-unsur tersebut, maka dapat menimbulkan sikap negatif pada pemilih.<sup>31</sup> Potensi yang dimiliki sumber tersebut juga akan mempengaruhi pesan. Adanya pesan yang disampaikan dari pihak lain dapat mencapai tujuan atau mengalami kegagalan tergantung dari potensi yang dimiliki oleh sumber.<sup>32</sup> Oleh karena itu, latar belakang menjadi hal yang penting diperhatikan dalam memilih caleg yang kelak akan duduk menjadi anggota dewan berikutnya.

Hal tersebut sejalan dengan hasil survei yang disajikan dalam Gambar 11 bahwa informasi mengenai latar belakang caleg menjadi poin yang dipertimbangkan oleh 57,65% responden. Selain itu, faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan responden, yaitu kesamaan agama yang dianut (49,41%), partai yang mencalonkan caleg tersebut sekaligus merupakan partai yang dipilih oleh responden (38,82%), merupakan pilihan orang-orang di sekitar responden seperti keluarga, teman kerja atau tetangga (36,47%). Kondisi tersebut menjelaskan bahwa latar belakang caleg yang berupa agama yang dianut

caleg dan partai politik yang mencalonkan caleg, turut mempengaruhi perilaku memilih bagi responden dalam pemilu legislatif lalu.



**Gambar 11.** Pertimbangan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dalam Memilih Calon Legislatif

Sementara itu, pemberian imbalan materi, pemasangan berbagai atribut kampanye, memilih salah satu caleg hanya karena caleg tersebut satu-satunya yang diketahui, dan baru memutuskan siapa caleg yang akan dipilih saat ada di TPS lebih sering terjadi pada responden yang tidak menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Meskipun hal-hal seperti pemberian janji bantuan materi, pemasangan berbagai atribut kampanye tidak terlalu memberikan dampak yang cukup berarti, namun bagi pemilih yang tinggal di daerah pedesaan terutama yang telah berusia lanjut dan tidak mengenyam pendidikan tinggi, hal-hal tersebut bisa menjadi pertimbangan yang berarti atau bahkan yang paling menentukan kepada caleg atau partai politik manakah suaranya akan diberikan. Bagi para pemilih yang berusia lanjut dan tinggal di pedesaan, hal yang terpenting bagi mereka adalah tercukupinya kebutuhan hidup dasar sehari-hari seperti kebutuhan pangan. Jadi, partai politik ataupun caleg yang bisa meyakinkan akan memperhatikan kesejahteraan hidup mereka, maka partai politik atau caleg itulah yang mereka pilih.

Sementara itu, para pemilih pemula menjadi objek yang penting untuk dianalisis karena mereka mempunyai peran strategis pada pemilihan umum. Alasan-alasan yang mendasari

<sup>31</sup> Stephen Franzoi, *Psikologi Sosial*, Penerjemah Rahmad, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2003).

<sup>32</sup> Diana, Adam Idris, dan Achmad Djumlani, "Sikap Pemilih Pemula terhadap Calon Legislatif Partai Politik Ditinjau dari Karakteristik Sosial (Studi Kasus Tingkat SMA di Samarinda)", *eJournal Administrative Reform*, 2014, Vol. 2, No. 2, hlm. 1261.

hal tersebut, yaitu *pertama*, pemilih pemula merupakan kelompok pemilih yang mempunyai jumlah secara kuantitatif relatif banyak dari setiap pemilihan umum. *Kedua*, pemilih pemula merupakan satu segmen pemilih yang mempunyai pola perilaku sendiri dan sulit untuk diatur atau diprediksi. *Ketiga*, kekhawatiran bahwa pemilih pemula akan lebih condong menjadi golput dikarenakan kebingungan karena banyaknya pilihan partai politik yang muncul yang akhirnya menjadikan mereka tidak memilih sama sekali. *Keempat*, masing-masing organisasi sosial politik mengklaim sebagai organisasi yang sangat cocok menjadi penyalur aspirasi bagi pemilih pemula yang akhirnya muncul strategi dari setiap partai politik untuk mempengaruhi pemilih pemula.<sup>33</sup>

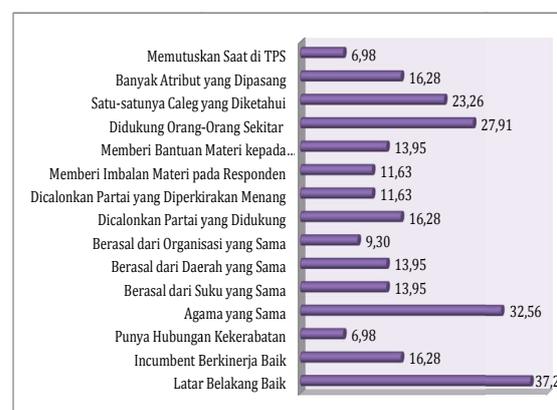
Gabriel Almond dan Sidney Verba menyatakan bahwa orientasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilih politiknya dikategorikan menjadi tiga yaitu, *pertama*, orientasi kognitif yaitu pengetahuan dan kepercayaan pada kandidat, *kedua*, orientasi politik afektif yaitu perasaan terhadap pemilu, pengaruh teman terhadap penentuan pilihan, dan *ketiga*, orientasi politik evaluatif yaitu keputusan dan pendapat pemilih pemula terhadap parpol/kandidat pilihannya.<sup>34</sup> Orientasi politik pemilih pemula selalu dinamis, mengikuti kondisi di sekitar yang mempengaruhinya. Sedangkan menurut hasil penelitian Karim, ada empat faktor yang mempengaruhi partisipasi politik anak muda dalam menentukan pilihan yaitu status sosial ekonomi orang tua, partisipasi orang tua, kegiatan sekolah menengah atas remaja, dan orientasi kemasyarakatan orang tua.<sup>35</sup> Pengaruh orang tua dan lingkungan pergaulan dalam mempengaruhi perilaku politik para pemilih pemula ini juga diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Herkulanus Roni. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemilih pemula cenderung tidak rasional dan cerdas. Ketidakrasionalan ini

<sup>33</sup> Setiajidi, "Orientasi Politik yang Mempengaruhi Pemilih Pemula dalam Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2010 (Studi Kasus Pemilih Pemula di Kota Semarang)", *Integralistik*, No.1/Th.XXII/2011, Januari-Juni 2011, hlm. 20.

<sup>34</sup> Gabriel Almond dan Sydney Verba, *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik, dan Demokrasi di Lima Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990).

<sup>35</sup> Diana, Adam Idris, dan Achmad Djumlani, *op.cit.*, hlm. 1253.

dipengaruhi dari orang tua, kerabat dekat, juga karena loyalitas terhadap etnis. Pandangan ini didasari selain oleh karena pemilih pemula tidak memperoleh informasi yang cukup, juga karena kuatnya pengaruh lingkungan dan kelompok sosial dari pemilih pemula tersebut<sup>36</sup> yang dapat dilihat dalam Gambar 12 dibawah ini.



**Gambar 12.** Pertimbangan Pemilih Pemula dalam Memilih Calon Legislatif

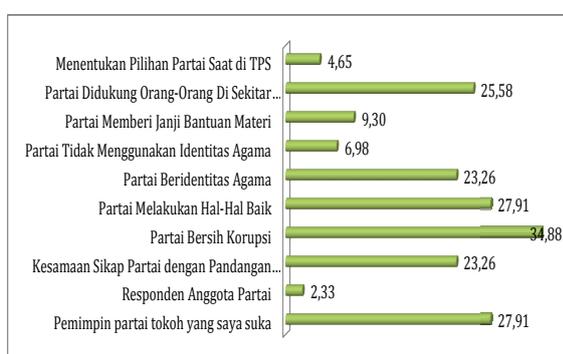
Dalam memilih caleg yang akan mewakilinya di DPR, menurut hasil survei yang dilakukan, sebanyak 37,21% pemilih pemula ternyata melihat dari latar belakang caleg, apakah caleg yang akan dipilihnya memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman yang baik. Faktor kesamaan agama juga merupakan pertimbangan dari 32,56% pemilih pemula dalam menentukan caleg yang akan dipilihnya. Sebanyak 27,91% pemilih pemula memilih caleg karena ikut-ikutan orang di sekitarnya. Mereka memilih caleg yang didukung oleh keluarga, teman atau tetangga. Bahkan 23,26% pemilih pemula ada yang memilih seorang caleg hanya karena caleg tersebut merupakan satu-satunya caleg yang dia ketahui.

Sedangkan, dalam memilih partai politik, bebas dari korupsi merupakan hal yang paling dianggap penting dan menjadi pertimbangan sebagian besar pemilih pemula (34,88%). Faktor tokoh pimpinan partai dan hal-hal baik yang telah dilakukan partai serta kader-kadernya menjadi pertimbangan 27,91% pemilih pemula. Sama

<sup>36</sup> Herkulanus Roni, "Pola Perilaku Pemilih Pemula pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 (Studi di Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang)", *Aspirasi*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2013.

halnya dengan pertimbangan dalam memilih caleg, sebagian pemilih pemula (25,58%) ada yang memilih parpol karena pertimbangan bahwa parpol tersebut didukung oleh orang-orang di sekitarnya.

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pemilih pemula masih tidak terlalu rasional dalam menentukan pilihan sikap politiknya. Selain faktor latar belakang caleg dan parpol, hal-hal lain yang kemudian menjadi pertimbangan pemilih pemula dalam menentukan pilihan sikap politiknya cenderung hal-hal tidak rasional yang semata karena terpengaruh lingkungan di sekitarnya, seperti pada Gambar 13 dibawah ini.



**Gambar 13.** Pertimbangan Pemilih Pemula dalam Memilih Partai Politik

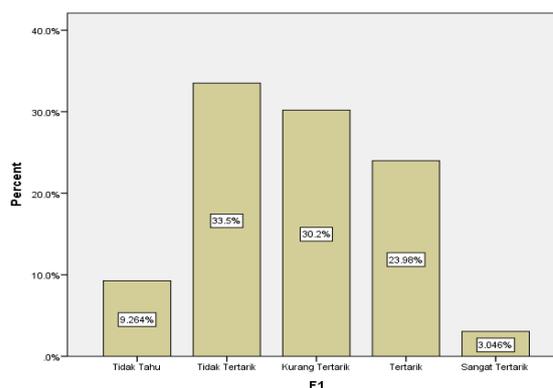
### 3. Faktor Psikologis dalam Perilaku Memilih

Pendekatan psikologis dalam perilaku memilih berkaitan dengan identifikasi terhadap suatu partai politik yang merupakan hasil sosialisasi politik yang sangat panjang dan sifatnya menetap. Identifikasi partai acapkali dipengaruhi oleh lingkungan keluarga seperti diskusi antara anggota keluarga dan pengaruh orang tua terhadap anggota keluarga lainnya. Dengan kata lain, identifikasi pilihan partai seseorang diperoleh melalui sosialisasi politik diantara anggota keluarga. Ketertarikan membicarakan isu-isu seputar politik pemerintahan menjadi faktor yang berpengaruh dalam menentukan pilihan khususnya dalam pemilu.

Temuan hasil survei P2P menunjukkan bahwa diskusi mengenai politik dalam lingkungan terkecil khususnya keluarga turut mempengaruhi pilihan dalam pemilu. Media massa khususnya televisi memberikan informasi terbanyak

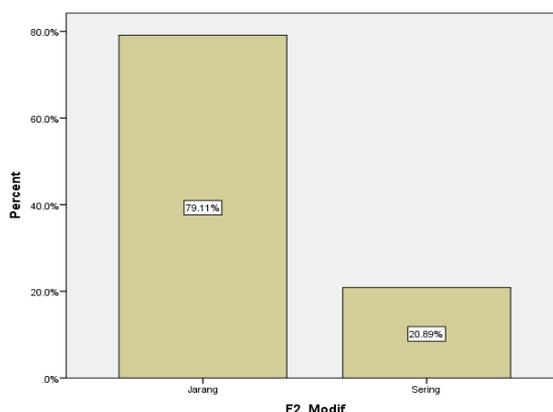
mengenai perkembangan politik terkini sehingga turut serta mempengaruhi pilihan dalam pemilu legislatif lalu.

Namun demikian, rendahnya loyalitas terhadap partai politik serta tidak adanya identitas kepartaian pada seseorang, menjadikan mudahnya pemilih untuk pindah ke partai lainnya. Hal tersebut menyebabkan timbulnya jarak ideologis antara pemilih dengan partai politik. Hal ini terlihat ketika sebanyak 33,5% responden menyatakan kurang tertarik terhadap masalah politik dan pemerintahan, yang dapat dilihat dalam Gambar 14 dibawah ini.



**Gambar 14.** Ketertarikan Terhadap Partai Politik

Gambar 14 di atas berbanding lurus dengan kuantitas pemilih dalam mendiskusikan masalah politik dengan anggota keluarga maupun tetangga atau orang lain. Sebanyak 79,11% responden menyatakan jarang membahas dan mendiskusikan topik-topik politik dengan anggota keluarganya. Berikut adalah Gambar 15 yang menunjukkan intensitas responden dalam membicarakan topik politik dengan keluarga.



**Gambar 15.** Kuantitas Mendiskusikan Masalah Politik

Gambar 15 di atas memperlihatkan sebanyak 79,11% responden jarang atau tidak pernah membicarakan politik pemerintahan maupun nilai-nilai partai dalam keluarga, sedangkan sisanya sebanyak 20,89% responden sering mendiskusikan dan mendapat sosialisasi politik dan nilai-nilai partai dalam keluarganya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar pemilih yang berada di daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah dan sangat minim mendapatkan sosialisasi politik dalam mendiskusikan nilai-nilai partai baik melalui media televisi, radio, koran maupun internet. Jumlah ini menjadi penjelasan logis dari terbentuknya identifikasi partai politik pemilih pada Pemilu Legislatif 2014. Melalui sosialisasi tersebut yang dilakukan diantara anggota keluarga dapat membentuk identifikasi partai politik dan tingkat partisipasi dalam Pemilu. Sebagai contoh misalnya, PDIP merupakan partai yang memiliki basis yang sangat konsisten dan komitmen terhadap partainya. Hal tersebut tercermin dalam teori perilaku memilih, khususnya pendekatan psikologis yang mengatakan adanya hubungan antara partai pilihan dengan kandidat pilihan masyarakat.

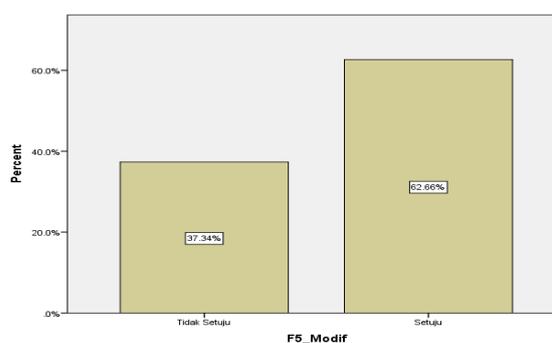
Selain ketertarikan terhadap politik (*political interest*), sosialisasi media massa seputar partai politik maupun kandidat menjadi salah satu bagian dari faktor psikologis yang juga turut berpengaruh dalam menentukan pilihan pemilih. Sosialisasi media merupakan cermin dari kepentingan publik yang menyajikan pemberitaan berdasarkan peristiwa yang terjadi di sekitar masyarakat.

Media mempunyai hubungan yang erat antara berita yang disosialisasikan dengan isu publik yang memiliki arti penting. Melalui media inilah, berita-berita seputar politik, partai politik maupun kandidat dapat diketahui masyarakat, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. Sebagian besar pemilih membutuhkan informasi untuk memahami dan mengevaluasi dinamika politik. Dengan demikian pemilih dapat mengetahui dan memiliki ikatan emosional dengan partai maupun kandidat tertentu.

Pada Pemilu 2014, peran media massa begitu signifikan hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pemberitaan tentang berita

politik yang dipublikasikan oleh baik media cetak maupun online. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indonesia Indikator, sebanyak 12,5% dari 272 media online di Indonesia menempati posisi teratas seputar topik politik dibanding topik lainnya.<sup>3736</sup> Pemberitaan politik didominasi oleh kasus korupsi, sengketa pemilu, partai politik, anggota legislatif dan sebagainya. Bahkan menjelang dan pasca Pemilu 2014, partai politik, serta pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bersaing dalam Pemilu berlomba untuk mendapatkan perhatian dan membangun citra positif mereka dengan melakukan banyak kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Partai politik mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mendukung capres dan cawapres yang diusungnya. Dari sini dapat dilihat bahwa peran media sangat dominan yang dapat mempengaruhi perilaku memilih dibandingkan dengan diskusi dengan keluarga.

Hasil survei P2P LIPI mengenai peran media massa dalam Pemilu 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 62,66% responden setuju dengan peran media dalam mempengaruhi perilaku memilih, sedangkan sisanya 37,34% responden tidak setuju. Gambar 16 menunjukkan hasil analisa kepercayaan publik terhadap peran media massa.

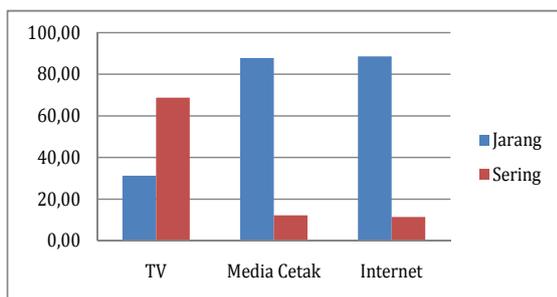


**Gambar 16.** Peran Media Massa

Dalam kaitannya dengan Pemilu 2014, isu mengenai akses media, baik cetak maupun elektronik, sebagai sumber informasi politik dan pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan terhadap institusi politik menghasilkan beberapa

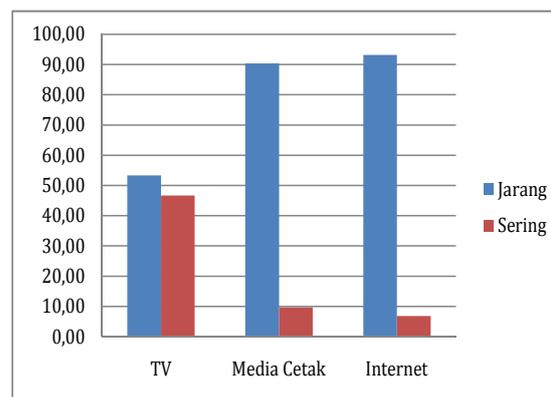
<sup>37</sup> Antaranews, "Survei: 253.718 Berita Politik Warnai Sepanjang 2013", 30 Desember 2013, <http://www.antaranews.com/berita/411766/survei-253718-berita-politik-warnai-sepanjang-2013>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2015.

temuan menarik. Temuan hasil survei P2P LIPI menunjukkan bahwa sekitar 90% responden menggunakan media cetak seperti koran sebagai sumber informasi utama untuk mencari dan memahami dinamika politik yang terjadi di Indonesia khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan selebihnya sebanyak 30% menggunakan sarana televisi sebagai sumber informasi politik. Sementara itu, sebanyak 90% responden sangat jarang mengakses internet untuk membaca berita seputar politik seperti pada Gambar 17 di bawah ini.



**Gambar 17.** Persentase Menggunakan Media Massa

Hasil temuan pada Gambar 17 di atas menunjukkan bahwa ada hubungan antara penggunaan yang intensif terhadap akses media dengan kepedulian politik pemilih meskipun pada saat yang sama juga menaikkan tingkat apatisme pemilih terhadap isu politik. Demikian juga, televisi masih menjadi media utama untuk mengikuti perkembangan berita politik. Sebanyak 55% responden menggunakan televisi sebagai media untuk mencari info terkini seputar berita politik, sedangkan sebanyak 85% masih jarang menggunakan media cetak dan internet sebagai sumber informasi utama. Dengan demikian, di daerah pedesaan akses untuk mendapatkan informasi politik masih terbatas pada penggunaan televisi, sementara penggunaan internet sebagai media informasi politik masih rendah, seperti pada Gambar 18 di bawah ini.



**Gambar 18.** Persentase Perkembangan Informasi Politik Melalui Media Massa

Tingginya penggunaan media televisi sebagai sumber informasi politik dipandang oleh sebagian kalangan sebagai fenomena *telepolitics* dengan munculnya dominasi media terutama televisi dalam mempengaruhi pemilih. Televisi mampu masuk ke ruang domestik keluarga dan menjadi perantara hubungan yang bersifat luas.

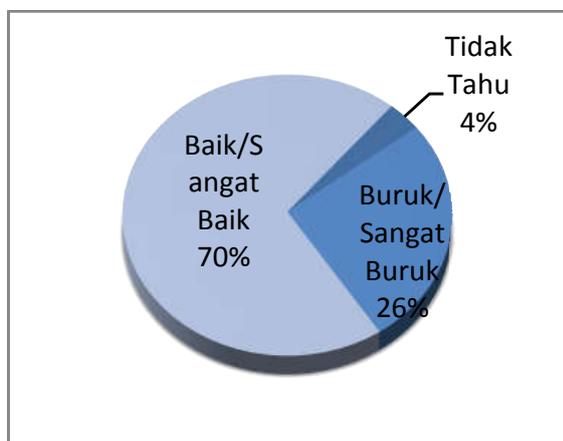
Berbeda dengan diskusi politik dengan keluarga maupun kampanye yang menghadirkan caleg atau partai tertentu, akses informasi melalui media televisi lebih bersifat praktis dan dapat menunjang seluruh lapisan masyarakat terutama di pedesaan dimana akses internet masih terbatas. Sebagai media yang dapat diakses setiap golongan masyarakat tanpa terhalang oleh ruang dan waktu, televisi telah menjadi saluran kampanye yang efektif dan berpengaruh besar terhadap pembentukan opini publik yang juga sudah mendominasi ranah politik.

Meningkatnya elektabilitas kandidat maupun partai tertentu tidak lepas dari peran media sebagai wahana untuk melampaui pesan-pesannya, baik berupa program, sikap maupun kampanye politik kepada publik. Karena, banyak partai politik maupun calon yang akan berkompetisi dalam pemilu memanfaatkan media untuk menyampaikan visi dan misinya kepada publik. Banyak sedikitnya siaran yang berhubungan dengan transformasi ataupun sosialisasi politik akan sangat berpengaruh terhadap penilaian masyarakat terhadapnya.

#### 4. Faktor Ekonomi/Rasional dalam Perilaku Pemilih

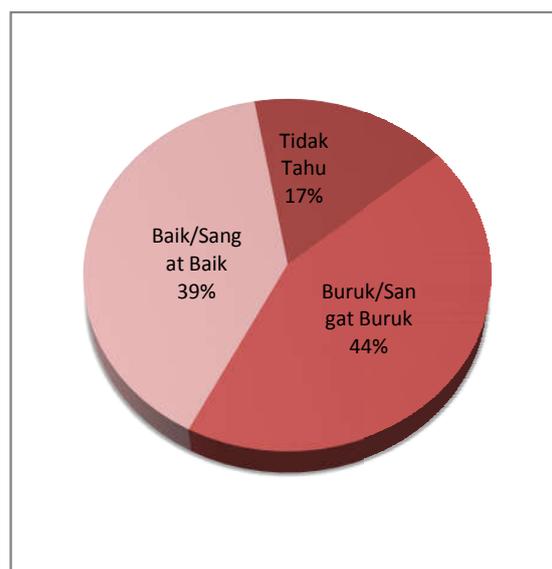
Faktor ekonomi/rasional dalam perilaku pemilih berkaitan dengan evaluasi terhadap kondisi ekonomi dirinya, keluarga, dan juga kondisi ekonomi nasional, yang kemudian mempengaruhi pilihannya terhadap partai politik dan caleg yang diusungnya. Dalam survei yang dilakukan tahun 2014 lalu, memperlihatkan bahwa sebanyak 70% responden yang menyatakan bahwa kondisi perekonomian mereka berada dalam kondisi yang baik atau sangat baik. Sedangkan sisanya sebanyak 26% menyatakan bahwa kondisi perekonomian mereka dalam kondisi yang buruk atau sangat buruk, yang dapat dilihat dalam Gambar 19 dibawah ini.

Mayoritas responden yang menyatakan bahwa perekonomian mereka dalam kondisi stabil memberikan indikasi bahwa proses pematangan demokrasi sudah mulai mendalam. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,8% dengan pendapatan per kapita yang mencapai 3.600 dollar AS memperlihatkan aktivitas politik yang ditopang oleh kelas menengah yang aktif dalam ekonomi. Oleh karena itu, kelas menengah yang melek secara ekonomi ini yang kemudian mendorong munculnya independensi dan non-partisan terhadap politik, dalam artian kelompok menengah ini tidak memiliki kesetiaan tunggal terhadap salah satu partai politik maupun caleg yang diusungnya. Hasilnya terlihat dalam pemilu legislatif 2014 lalu bahwa partisipasi politik dan egalitarian muncul dalam pemilu yang mayoritas didukung oleh kelas menengah yang mengikuti pemilu.



Gambar 19. Keadaan Ekonomi Keluarga Saat Ini

Sementara itu, sebanyak 44% responden menyatakan bahwa perekonomian Indonesia sendiri dalam kondisi yang buruk dan sangat buruk. Sedangkan 39% responden menyatakan bahwa perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang baik dan sangat baik seperti pada Gambar 20 dibawah ini. Adanya perbedaan dalam melihat perekonomian negara bermuara pada bagaimana diseminasi dan distribusi perekonomian nasional yang dilakukan oleh negara. Negara sendiri bertindak sebagai regulator.



Gambar 20. Keadaan Ekonomi Indonesia Saat Ini

Ketiga faktor yang mempengaruhi pilihan politik dalam pemilu yaitu faktor sosiologis, psikologis, dan rasional, muncul dalam kondisi yang khas melalui hasil survei yang dilakukan P2P LIPI tahun 2014 lalu. Faktor sosiologis memperlihatkan faktor agama yang berupa latar belakang agama caleg, dan faktor pendidikan yang berupa latar belakang pendidikan caleg serta latar belakang pendidikan pemilih, mempengaruhi pilihan dalam pemilu legislatif lalu. Faktor psikologis menunjukkan bahwa identifikasi partai acapkali dipengaruhi oleh lingkungan keluarga seperti diskusi antara anggota keluarga dan pengaruh orang tua terhadap anggota keluarga lainnya. Dengan kata lain, identifikasi pilihan partai seseorang diperoleh melalui sosialisasi politik diantara anggota keluarga. Ketertarikan membicarakan isu-isu seputar politik pemerintahan menjadi

faktor yang berpengaruh dalam menentukan pilihan khususnya dalam pemilu. Sementara itu, faktor rasional menunjukkan bahwa evaluasi terhadap kondisi ekonomi dirinya, keluarga, dan juga kondisi ekonomi nasional, yang kemudian mempengaruhi pilihannya terhadap partai politik dan caleg yang diusungnya dalam pemilu.

## Penutup

Kajian mengenai perilaku pemilih menghadapi pemilu legislatif, yang berkaitan dengan faktor sosiologis, memuat beberapa hal yang harus digarisbawahi. *Pertama*, dalam diri pemilih, ketaatan seseorang dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya tidak selalu memberikan pengaruh pada pilihan partai politiknya. Namun demikian, ketika pemilih dihadapkan pada pilihan calon legislatif dalam pemilu, latar belakang agama caleg memberi pengaruh terhadap pilihan calegnya, dimana pemilih cenderung memilih caleg yang menganut agama yang sama dengan dirinya.

*Kedua*, dalam survei ini, adanya janji-janji pemberian bantuan materi memang tidak banyak mempengaruhi para pemilih dalam menentukan pilihannya. Namun demikian, bagi pemilih yang telah berusia lanjut, tinggal di pedesaan, dan berpendidikan rendah, maka janji-janji pemberian bantuan materi tersebut merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam memberikan suaranya dalam pemilu legislatif tersebut.

*Ketiga*, dalam menentukan pilihan politiknya, para pemilih pemula sering terpengaruh oleh pilihan orang-orang di sekitarnya seperti keluarga dan teman sekelompoknya. Para pemilih pemula ini khususnya yang tinggal di pedesaan, mayoritas mengikuti sikap orang tuanya atau tokoh yang dihormati di lingkungannya. Dalam kaitannya dengan pilihan terhadap partai politik, kaum pemilih pemula ini cenderung meneruskan tradisi keluarga dengan memilih partai politik yang selama ini telah dipilih secara turun menurun oleh keluarganya dari generasi ke generasi. Sementara itu, dalam memilih calon legislatif, kaum pemilih pemula ini cenderung memilih figur yang terkenal meskipun mereka tahu lebih lanjut tentang latar belakang dan visi misi caleg tersebut.

Selanjutnya, kajian mengenai perilaku pemilih menghadapi pemilu legislatif, yang berkaitan dengan faktor psikologis memperlihatkan beberapa catatan penting. *Pertama*, diskusi mengenai politik dalam lingkungan terkecil khususnya keluarga turut mempengaruhi pilihan dalam pemilu. Media massa khususnya televisi memberikan informasi terbanyak mengenai perkembangan politik terkini sehingga turut serta mempengaruhi pilihan dalam pemilu legislatif lalu.

*Kedua*, rendahnya loyalitas terhadap partai politik serta tidak adanya identitas kepartaian pada seseorang, menjadikan mudahnya pemilih untuk pindah ke partai lainnya. Hal tersebut menyebabkan timbulnya jarak ideologis antara pemilih dengan partai politik.

Sementara itu, kajian mengenai perilaku pemilih menghadapi pemilu legislatif, yang berkaitan dengan faktor rasional/ekonomi memperlihatkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan isu yang strategis bagi mayoritas pemilih. Pemenuhan kebutuhan ekonomi ini yang kemudian berkembang menjadi kompetisi antar kandidat anggota legislatif, maupun antar partai politik sendiri, untuk membangun kedekatan dengan pemilihnya. Tujuan utamanya adalah bagaimana bisa mendapatkan dukungan dari pemilih yang kemudian mampu memberikan kesejahteraan kepada para pemilihnya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Almond, Gabriel, dan Sydney Verba. 1990. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik, dan Demokrasi di Lima Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Babbie, Earl. 2000. *The Practice of Social Research*. USA: Wadsworth/Thomson Learning.
- Evans, Jocelyn A.J. 2004. *Voters and Voting*. London: Sage Publications.
- Franzoi, Stephen. 2003. *Psikologi Sosial*. Penerjemah Rahmad. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Listhaug, Ola. 2005. "Retrospective Voting", dalam Jacques Thomassen (Ed.). *The European Voter: A Comparative Study of Modern Democracies*. New York: Oxford University Press.
- Mujani, Saiful. 2007. *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di*

*Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Mujani, Saiful, William R. Liddle, dan Kuskridho Ambardi. 2012. *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Mizan Publika.
- Neuman, W. Lawrence. 2000. *Sosial Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Third edition*. Boston: Allyn and Bacon.
- Roth, Dieter. 2009. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.

### **Jurnal**

- Diana, Adam Idris, dan Achmad Djumlani. 2014. "Sikap Pemilih Pemula terhadap Calon Legislatif Partai Politik Ditinjau dari Karakteristik Sosial (Studi Kasus Tingkat SMA di Samarinda)". *eJournal Administrative Reform* 2(2).
- Liddle, R. William dan Saiful Mujani. 2007. "Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia". *Comparative Political Studies* 40(7).
- Roni, Herkulanus. 2013. "Pola Perilaku Pemilih Pemula pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 (Studi di Kecamatan

Bengkayang, Kabupaten Bengkayang". *Aspirasi* 2(2).

- Setiajid. 2011. "Orientasi Politik yang Mempengaruhi Pemilih Pemula dalam Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2010 (Studi Kasus Pemilih Pemula di Kota Semarang)". *Integralistik*. No.1/Th.XXII/2011. Januari-Juni.
- Sudrajat, Adat. 2002. "Agama dan Perilaku Politik". *Jurnal Humanika*. No. 1. Tahun 1.

### **Surat Kabar dan Website**

- AntaraneWS. "Survei: 253.718 Berita Politik Warnai Sepanjang 2013". 30 Desember 2013. <http://www.antaraneWS.com/berita/411766/survei-253718-berita-politik-warnai-sepanjang-2013>.
- Mulyawarman. (n.d.). "Perilaku Pemilih Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa: Kasus Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar". <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/download/1265/1256>.